



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	A2
Pos Metro	

Tanggal			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

DPRD Tanah Datar Setujui Ranperda

BATUSANGKAR - DPRD Tanah Datar menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 menjadi Perda pada sidang paripurna, Senin, (26/7).

Sidang berisi pengambilan keputusan dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra bersama Saidani, dihadiri sebagian anggota dewan. Diikuti Wabup Zulfadri Darma Forkompinda, Plh. Sekda Edi Susanto dan pejabat Pemkab.

Diawali dengan laporan Ketua tim perumus Bamus DPRD, disampaikan H. Azwar Rabain tentang kesimpulan rekomendasi LHK

BPK RI, yang berisi kritikan, saran dan masukan terhadap tindak lanjut, rencana terhadap laporan keuangan Pemkab 2019.

Menurut Azwar, rumusannya bersumber dari LHK BPK RI perwakilan Sumbar tahun anggaran 2019, serta hasil pembahasan Bamus DPRD dengan Pemkab pada 7-23 Juli 2020 dibuat secara sistematis.

Sementara, Wakil Ketua Saidani mengatakan laporan hasil pembicaraan tingkat pertama pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini telah dibahas

bersama badan anggaran dengan TAPD dan dilanjutkan dengan pandangan fraksi DPRD pada 24 Juli 2020 silam.

"Setelah mencermati pendapat akhir fraksi DPRD dalam pembahasan dengan TAPD, maka badan anggaran dapat memahami Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah," tandas Saidani.

Atas diterima Ranperda ini, Wabup Zulfadri menyatakan apresiasi pada pimpinan dan anggota dewan yang merampungkan pembahasan Ranper-

da ini, sebagai dasar dalam penyusunan KU-PPAS perubahan APBD 2020.

Atas masukan, kritikan dan saran anggota dewan, Wabup meminta agar semua OPT terkat menindaklanjutinya.

Ia meminta agar perlu adanya penjadwalan pembahasan tahapan penganggaran sesuai kalender anggaran 2020 sehingga pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat segera dilaksanakan sehingga tidak mempengaruhi opini BPK-RI terhadap kinerja keuangan tahun ini.

Dikatakannya, prestasi yang telah ditoreh, yakni sebagai pengelolaan keuangan dibuktikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 kalinya diterima Pemkab bisa terus dipertahankan.

Makanya, lanjut Wabup, butuh segera lakukan penjadwalan pembahasan tahapan penganggaran. "Alhamdulillah, telah disepakati Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini, disini diharapkan dukungan agar tetap komit untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah," timpalnya. (521)



TERIMA | Wabup Zulfadri Darma menerima dokumen pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Wakil Ketua Saidani. (yusnaldi)